

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Abd Razak Musahib, dkk., 2022, *Hukum Lingkungan*, PT Global Eksekutif Teknologi, Sumatera Barat.

Amiruddin dan H Zainal Asikin, 2018, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Assiddiqie, J., 2007. *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi*. PT Bhuana Ilmu Populer: Jakarta.

Endang Soetari, 2018, *Kebijakan Publik*, CV. Pustaka Setia, Bandung.

Evita Isretno Israhadi, 2020, *Hukum Administrasi Negara*, Cintya Press, Jakarta.

Hasanal Mulkan dan Serlika Aprita, 2023, *Hukum Otonomi Daerah*, Penerbit Mitra Wacana Media, Bogor.

Hadjon, Philipus M., 2008. *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.

Ilham Mirzaya Putra, 2023, *Pengembangan Wilayah*, CV. Prokreatif, Sumatera Utara.

Indroharto, 2002, *Usaha Memahami Peradilan Tata Usaha Negara*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta,

Irfan Fachruddin, 2004, *Pengawasan Peradilan Administrasi Terhadap Tindakan Pemerintah*, Bandung: Alumnus.

Johani Ibrahim, 2007, *Teori Dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia Publishing, Malang.

Kadar Pamuji, dkk., 2023, *Hukum Administrasi Negara*, Unsoed Press, Purwokerto.

Nur Khaerat Nur, dkk., 2021, *Sistem Transportasi*, Yayasan Kita Menulis, Makassar

Prayudi, 1981, *Hukum Administrasi Negara*, Ghalia Indonesia, Jakarta.

Peter Mahmud Marzuki, 2017, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta.

Rahmawati Sururama dan Rizki Amalia, 2020, *Pengawasan Pemerintahan*, Cendekia Press, Bandung

Rondinelli, D.A. & Cheema, G.S. (2007). *Decentralizing Governance: Emerging Concepts and Practices*. Washington, DC: Brookings Institution Press.

Sahya Anggara, 2018, *Hukum Administrasi Negara*, Pustaka Setia, Bandung

Saiful Anwar, 2004, *Sendi-Sendi Hukum Administrasi Negara*, Glora Madani Press.

Sakti Adji Adisasmita, 2011, *Perencanaan Pembangunan Transportasi*, Graha Ilmu, Yogyakarta.

Sudrajat, H., Amir., J., dkk., 2024, *Otonomi Daerah dan Good Governance*, Mitra Mandiri Persada, Surabaya.

Suharizal, Muslim chaniago, 2017, *Hukum Pemerintahan Daerah Setelah Perubahan UUD 1945*, Thafa Media, Yogyakarta , hlm.52

Soesi Idayanti, 2023, *Hukum Transportasi*, Tri Star Mandiri, Banten.

Sondang., P.Siagian, 2011, *Filsafat Administrasi*, Bumi Aksara, Jakarta

Victor M, Situmorang dan Yusuf Juhir, 1993, *Aspek Hukum Pengawasan Melekat Dalam Lingkungan Aparatur Pemerintah*, Rineka Cipta, Jakarta

Widiarty, W.S., 2024, *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum*, Publika Global Media, Yogyakarta

B. Jurnal, Hasil Penelitian, Skripsi, Tesis, dan Disertasi

Adi Nugroho, A. S., 2023, Efektivitas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan Terhadap Pengendara Kendaraan Bermotor Dengan Muatan Barang Berlebih Serta Efek Terhadap Pengguna Lalu Lintas Lainnya. *Dinamika*, 29(1).

Alamsyah, A., Marsuni, L., & Rinaldy Bima, M., 2022, Efektivitas Hukum Pengawasan Muatan Lebih (*Over Loading*) Kendaraan Angkutan Barang: *Studi Pada Balai Pengelolah Transportasi Darat Wilayah XIX*, 4(2).

Angga Devi Mukti Setiadi, 2015, Implementasi Pasal 14 Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Pemberian Sanksi Administrasi Terhadap Kendaraan Yang Kelebihan Muatan Di Jembatan

Timbang (Studi Di Upt LLAJ Kabupaten Tulungagung), *Jurnal Mahasiswa, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya*.

Armajaya, M. R. L., 2022, Analisis Yuridis Terhadap Penerapan Kebijakan *Zero Over-Dimension* dan *Over Loading* (Bebas Ukuran Lebih Dan Muatan Lebih) Di Indonesia. *Sibatik Journal: Jurnal Ilmiah Bidang Sosial, Ekonomi, Budaya, Teknologi, Dan Pendidikan*, 1(12).

Daulay, R. F. N., 2024, Akibat Hukum Peralihan Kewenangan Pengawasan Muatan Lebih Dari Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Ke Kementerian Perhubungan: *Studi Kasus Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah II Provinsi Sumatera Utara*. *Grondwet*, 3(1).

Febriani, S. P., & Mintarsih, M., 2023, Penegakan Hukum Dalam Kebijakan *Zero Overdimension* dan *Overloading* Terhadap Pengangkutan Barang: *Law Enforcement in Zero Over Dimension and Over Loading Policy for Transportation of Goods*. *Reformasi Hukum*, 27(1).

Ferogusta, D. J., 2014, Pengawasan terhadap Pengemudi atau Perusahaan Angkutan Barang Berdasarkan Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Studi di Jembatan Timbang Batu Layang Kota Pontianak). *Jurnal Nestor Magister Hukum*, 3(4).

Hakim, L., 2021, Tinjauan Hukum Terhadap Pelanggaran Kelebihan Muatan Di Jembatan Timbang Kabupaten Blora. *International Journal of Law Society Services*, 1(1).

Hanif, M. F., & Muslim, I., 2022, Penegakan Hukum Terhadap Kendaraan Bermotor Angkutan Barang *Over Dimension Over Loading* di Kota Samarinda. *Borneo Studies and Research*, 4(1).

Lubis, R. K., 2023, Pengawasan Kendaraan Bermuatan Barang Di Satuan Pelayanan UPPKB (Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor) Jembatan Merah Kabupaten Mandailing Natal (*Doctoral dissertation, Universitas Medan Area*).

Hidayat, A. (2021). Desentralisasi, Koordinasi, dan Akuntabilitas Pemerintahan dalam Kerangka *Good Governance* di Indonesia. *Jurnal Kebijakan Publik dan Pemerintahan*, 9(3), 67–78.

Muhammad A. A., dkk., 2024, Hukum Administrasi Negara Sebagai Instrumen Pengawasan Dan Peningkatan Kinerja Pemerintah, *Gudang Jurnal Multidisiplin Ilmu*, 2(12).

Mulkan, H., & Aprita, D. (2023). Analisis Kewenangan Pemerintah dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. *Jurnal Ilmu Hukum Administrasi Negara*, 10(1), 44–58.

Nurhayati, S. (2020). Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran *Over Dimension* dan *Over Loading* dalam Perspektif Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. *Jurnal Hukum Transportasi Indonesia*, 7(2), 101–112.

Nopyandri, N. (2014). Hak atas Lingkungan Hidup dan Kaitannya dengan Peran Serta dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup dalam Perspektif Otonomi Daerah. *INOVATIF, Jurnal Ilmu Hukum*, 7(3).

Pelawi, R. A., 2016, Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pengangkutan Melebihi Daya Angkut Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ). *Skripsi Fakultas Hukum Universitas Brawijaya*.

Pratama, J. A., & Susanti, A., 2023, Analisis Penanganan Permasalahan *Overdimension Overloading* di Ruas Jalan Mojokerto–Surabaya. *Jurnal Media Publikasi Terapan Transportasi*, 1(2 (Agustus).

Putra, D. M., 2022, Penegakan Hukum Terhadap Kendaraan Yang Melebihi Daya Angkut dan Dimensi Sebagai Upaya Penanggulangan Kecelakaan Lalu Lintas Dan Kerusakan Jalan. *Unes Journal of Swara Justisia*, 6(2).

Safira, S. N., dkk., (2024). Analisis Tingkat Kerawanan Tanah Longsor Dengan Metode *Analytical Hierarchy Process* Di Jalur Wilayah Gumitir Kabupaten Jember.. *Jurnal Swarnabhumi Vol*, 9(2).

Wibisono, R. E., & Pratama, J. A. (2023). Analisis Fungsi Pengawasan Terhadap Jumlah Berat Muatan Kendaraan Sesuai JBI Dalam Rangka Peningkatan Keselamatan Lalu Lintas Jalan Raya. *Narotama Jurnal Teknik Sipil*, 7(2).

Wibowo, G. D. H., & Risnain, M., 2022, Pelaksanaan Pengawasan terhadap Kendaraan yang Muatannya Melebihi Daya Angkut dan Dimensi Berdasarkan Undang-undang No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Pulau Lombok. *Jurnal Education And Development*, 10(3).

W. Seno Ananto Nicolas, dkk, 2014, Analisis Antrian Angkutan Barang pada Jembatan Timbang dengan Metode Simulasi *Multiple Channel* (Studi Kasus pada Jembatan Timbang Sarang), *Jurnal Karya Teknik Sipil* Vol.3 No.4, Jurnal Online Universitas Diponegoro Semarang.

C. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945. Jakarta : Presiden Republik Indonesia.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Jakarta : Presiden Republik Indonesia

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang *Lalu Lintas dan Angkutan Jalan*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96. Jakarta: Presiden Republik Indonesia.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang *Pemerintahan Daerah*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244. Jakarta: Presiden Republik Indonesia.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang *Administrasi Pemerintahan*. Jakarta : Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96. Jakarta: Presiden Republik Indonesia.

Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang *Angkutan Jalan*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 260. Jakarta : Presiden Republik Indonesia.

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 18 Tahun 2021 tentang *Pengawasan Muatan Angkutan Barang dan Penyelenggaraan Penimbangan Kendaraan Bermotor di Jalan*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 529. Jakarta: Menteri Perhubungan Republik Indonesia

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 4 Tahun 2012 tentang *Pengendalian Kelebihan Muatan Angkutan Barang*. Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Taun 2012 Nomor 2 Seri D. Surabaya : Gubernur Jawa Timur.

Surat Edaran Menteri Perhubungan Nomor SE 21 Tahun 2019 tentang *Pengawasan terhadap Mobil Barang atas Pelanggaran Muatan Lebih (Over Loading) dan/atau Pelanggaran Ukuran Lebih (Over Dimension)*, Jakarta: Menteri Perhubungan Republik Indonesia.

Kementerian Perhubungan Republik Indonesia, *Laporan Evaluasi Pengawasan Kelebihan Muatan dan Dimensi Kendaraan Barang Tahun 2022*, Direktorat Jenderal Perhubungan Darat (Jakarta: Kemenhub RI, 2022), hlm. 5

Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Timur, *Rekapitulasi Kondisi Operasional Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor (UPPKB) Tahun 2023*, (Surabaya: Dishub Jatim, 2023), hlm. 12.

D. Internet

Admin, “Truk ODOL Berulang Kali Kecelakaan di Gunitir, DISHUB Jember Minta Asosiasi dan Perusahaan Patuhi Aturan”, dalam Radio Jember, 02 Januari 2026.

Anonim, “Soal Jalan Rusak Parah Kendaraan Jumbo Jadi Penyebab Utama, Begini Komentar DPRD Jember”, dalam Radar Jember, 10 Desember 2024.

Dinas Perhubungan Purwokerto. “Mengenal Jembatan Timbangan”, dalam dishub.purwakartakab.go.id, 11 Desember 2024

Radar Jember, “Soal Jalan Rusak Parah Kendaraan Jumbo Jadi Penyebab Utama, Begini Komentar DPRD Jember”, dalam Radar Jember, 10 Desember 2024.

Tazkiyah, “Jembatan Timbang Dan Efektifitas Penyelenggaraannya”, dalam Badan kebijakan transportasi Kementerian Perhubungan, 12 Desember 2024.

Yulio, “Banyak Truk ODOL Lolos Pengawasan, Jembatan Timbang Rambigundam Jember Tak Beroperasi, KENAPA?”, dalam Radar Jember, 1 Desember 2024.

